

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Chidir, 1991, *Badan Hukum*, Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2004, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan pertama , Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi ,2010, *Hukum Perusahaan “Bentuk-Bentuk badan usaha di Indonesia”*, Cetakan Pertama, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution, Bahder Johan, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bandung: Mandar Maju.
- Rido, R. Ali, S.H. 1984. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Cetakan keempat, Bandung: Penerbit Alumni.
- Silondae, Arus Akbar dan Wirawan B. Ilyas, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*, cetakan keempat, Jakarta: Salemba Empat.
- Soeharto, Bohar, 1989, *Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi-Tesis)*, Bandung: Tarsito.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanintijo, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumardjono,Maria SW., 2014, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Sunggono, Bambang, 2001, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Bandung: Raja Grafindo Persada.
- Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan pertama, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaya, Gunawan.. 2004. *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Perseroan Komanditer*. Jakarta: Prenada Media.

Widjaya, I.G. Rai, 2005, *Hukum Perusahaan*, cet. 4, Bekasi: Kesaint Blanc.

Jurnal/ Tesis

Kendri Eda Mukti, 2015, “Peran Notaris dalam Perubahan Status Badan Usaha Persekutuan Komanditer (CV) Menjadi Badan Usaha Berbadan Hukum Perseroan Terbatas (PT)”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Yolandha Shanty Dewi, 2017, “Kewenangan Notaris Pada Pembuatan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (Cv) Atas Saham Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Para Sekutu Komanditer”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Indonesia tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Indonesia tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Indonesia tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Indonesia tahun 2014 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Indonesia tahun 2017 Nomor 210).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Indonesia tahun 2018 Nomor 90).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, Dan Persekutuan Perdata. (Lembaran Negara Indonesia tahun 2018 Nomor 1011).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441).

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12-POJK.01-2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57).

Internet

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Ditjen AHU Online*, dalam <https://ahu.go.id>

_____, *Panduan Penggunaan AHU Online*, dalam <https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=start>

_____, *Panduan Persekutuan Komanditer (CV)*, dalam https://panduan.ahu.go.id/doku.php?id=panduan_cv

_____, *Sistem Administrasi Badan Usaha*, dalam <https://sab.ahu.go.id>

Hukum Online, *Ingat! Terlambat Daftar Online, Nama Badan Usaha Bisa Dipakai Orang*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ba391538aa89/ingat-terlambat-daftar-online--nama-badan-usaha-bisa-dipakai-orang/>

_____, *Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia Turun, Ini Langkah Pemerintah*, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5be3a63b419ec/peringkat-kemudahan-berusaha-indonesia-turun--ini-langkah-pemerintah/>

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Capaian Reformasi: Perbaikan Peringkat Indonesia*, dalam <https://eodb.ekon.go.id/capaian-reformasi/>

_____, *Indikator EoDB*, dalam <https://eodb.ekon.go.id/indikator-eodb/>

Portal Informasi Indonesia, *Perizinan Berusaha Melalui OSS*, dalam <https://www.indonesia.go.id/layanan/investasi/sosial/perizinan-berusaha-melalui-oss/>